

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA  
SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh**

**KOHEN SOFI**

**NIM. 110565201117**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2015**

## ABSTRAK

Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya masing-masing, termasuk dalam hal pembangunan daerah berhak untuk merancang serta merencanakan pembangunan di daerahnya. Dengan adanya hal ini, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam partisipasi pembangunan di daerah. Sebagaimana falsafah yang terkandung dalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan tahun 2014. Dimana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi menjadi subjek pembangunan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan 5 (lima) Masyarakat Desa Kuala Sempang. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisa data triangulasi yaitu melakukan pengecekan keabsahan data hasil wawancara dengan semua informan.

Adapun hasil temuan di lapangan, dapat digambarkan bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika melihat dari indikator-indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk tenaga dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Maka bentuk partisipasi tersebut sudah berjalan cukup baik meskipun ada kendala didalam pelaksanaannya.

Salah satunya adalah pembangunan pipanisasi yang lahir dari ide masyarakat Desa Kuala Sempang. Dengan adanya dukungan dan dorongan dari Kepala Desa Kuala Sempang dan aparatnya cukup berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dapat terlaksana.

Adapun saran bagi masyarakat Desa Kuala Sempang, Kepala Desa Kuala Sempang beserta seluruh aparatur pelaksana Pemerintahan di Desa Kuala Sempang, agar dapat bekerja sama dalam hal pembangunan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Tidak hanya itu, diharapkan masyarakat untuk terus membantu pemerintah dalam hal ide, materi maupun tenaga dalam hal pembangunan tersebut, agar pembangunan di Desa dapat terus berjalan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

## ABSTRACT

Regional autonomy have give a discretion to the region to arrange and set the government for each region about the regional development that have rights for setting and planning the development in their region. Because of this things, the people have ordered to be active in participation for region develepment. About the philosophy that have included in the region autonomy is the people participation.

This study is conducted to know people participation in development of Kuala Sempang Village Kuala Lobam Distict Bintan Regancy 2014. People is no longer as the object of development but as its subject. This study is a qualitative study with 7 informan consists of head of the village, head of BPD and 5 people of Kuala Sempang Village. This study used triangulation data analysis to validate the interview results of all the informan.

The result shown the application of people participation in development of Kuala Sempang Village Seri Kuala Lobam District Bintan Regancy is good seen by the indicators people participation in development such as people participation in idea, in goods, in power and people participation in utilization of development as well. All kind of the participation has been doing so well but still have some problems in the application.

One of the development is pipeline project that suggested from the people ideas in Kuala Sempang village. The support from head of kuala sempang village and the asset have been doing so well to carrying out the function in to support and push the development of the people participation so that the development that have been working by the village government will success.

People and head of Kuala Sempang village and also the government have to work together in development to welfare the people. People is expected to help the government in idea, goods or even power in the development so the village development can continue running.

Keywords: people participation, village development

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA  
SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**

**A. Latar Belakang**

Setiap negara dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem politik yang dianutnya. Mengingat besarnya penguasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan dalih pencegahan separatism, namun kenyataannya sekaligus di muka, maka dibentuklah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yaitu menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik (Syafiie, 2011:193).

Melihat pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pengertian otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan.

Kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena didalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan Arif (dalam Mustari, 2011:1). Dengan demikian, harapan masyarakat untuk mencapai pembangunan dalam rangka perubahan kondisi dari suatu realita ke realita secara keseluruhan menjadi lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang terkandung didalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai *instrument* hukum berupa UU atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan *monitoring* pembangunan.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Selain UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Menurut H.A.R Tilaar (dalam Ramadhan, 2012:1), partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*botton-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi

(dalam Firmansyah, 2009:1), adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

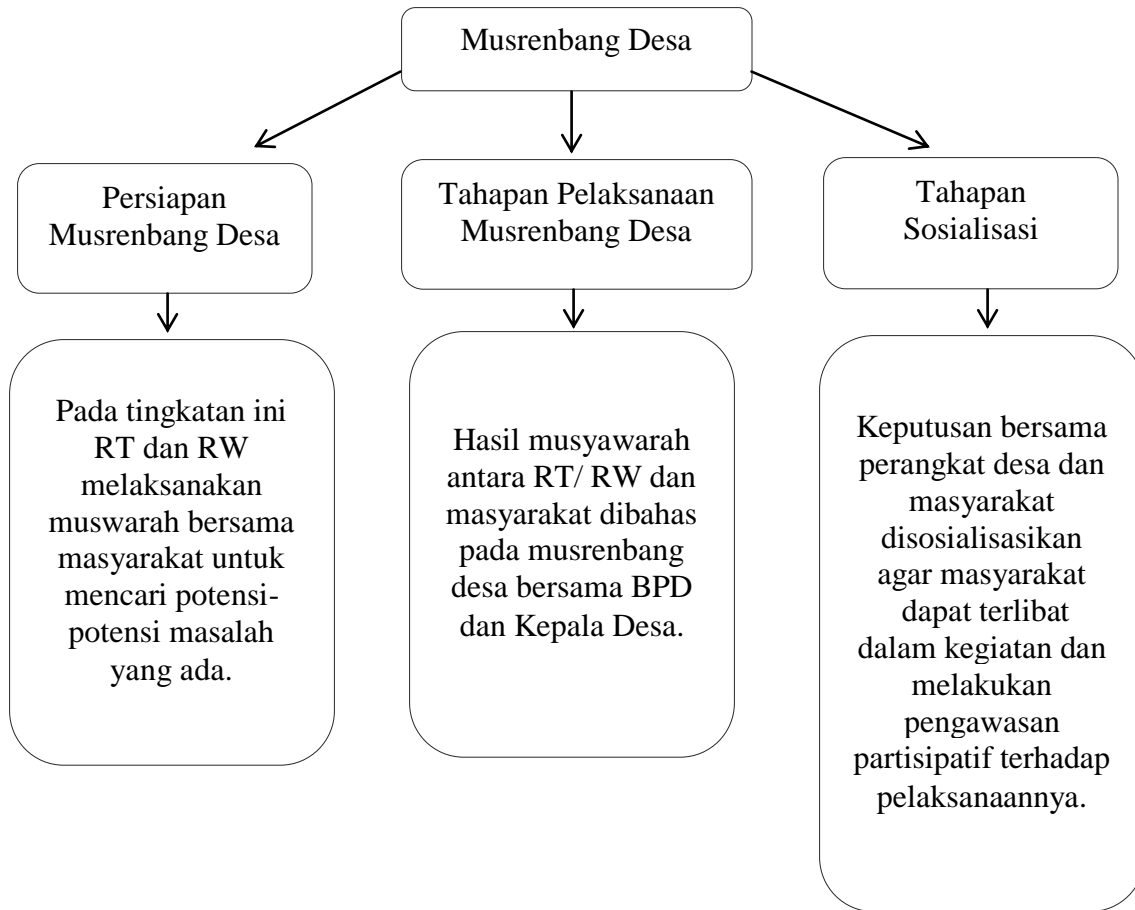
Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mendasari pada kebutuhan masyarakat setempat serta didukung peran serta aktif dari masyarakat dari awal pengidentifikasian masalah hingga tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, tepat waktu, berdayaguna dan berhasil guna apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Tahapan Musrenbang terdiri dari tiga tahapan yaitu : pertama tahapan persiapan Musrenbang Desa, kedua

tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa, ketiga tahapan Sosialisasi. Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini:

**Gambar I.I  
Potensi Partisipasi**



Sumber : Olahan Penulis

Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengelola pemerintahan desa, harus memahami arti penting perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencanaan tersebut dalam proses pembangunan di desa. Hal ini kiranya sangat penting, karena sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten dan kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Di samping otonomi yang dimilikinya, desa (pemerintah desa) juga dapat menerima atau melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Dengan demikian desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan.

Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa landasan pemikiran mengenai pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi di sini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Sedangkan demokratisasi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 juga ditegaskan bahwa substansi pemberdayaan masyarakat adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan bagian dari esensi otonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat perdesaan hingga kabupaten. Oleh karena itulah, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.

Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya ditingkat desa. UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 14, ayat 2.g menjelaskan, bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif.

Hal diatas kemudian memunculkan pertanyaan di kabupaten bintang, khususnya di desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, apakah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah desa, serta bagaimana proses pelibatan masyarakat baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepemilikan sumber daya yang diperlukan perihal partisipasi, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya seperti dana dan tenaga. Aspek yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan peran pendidikan dianggap cukup tinggi dalam menciptakan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kita. Oleh karena itu, agar kemampuan berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Apabila masyarakat diberikan tanggung jawab ikut serta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka masyarakat tentu saja dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur masyarakat akan benar-benar membangun sesuai dengan kebutuhan dan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dalam judul: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014”**.

## **B. Kerangka Teori**

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan.

Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas didalam penelitian ini adalah partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat

terhadap perubahan yang sedang berjalan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie. 2009:141).

Berkaitan dengan proses pembangunan Adisasmita (dalam Solekhan, 2012:20) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal. Sedangkan dalam konteks perencanaan, UU Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam penyusunan rencana pembangunan.

Gaventa dan Valderama (dalam Solekhan, 2012:31) menengaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih dari pada itu, partisipasi warga juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, Rusidi (dalam Solekhan, 2012:32) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi, yang terdiri dari :

- a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan).
- b. Sumbangan materi (dana dan barang).
- c. Sumbangan tenaga (bekerja).
- d. Memanfaatkan pembangunan.

Sumbangan pemikiran adalah bagaimana masyarakat memberikan ide pemikiran untuk pembangunan dan kemajuan di desa, sumbangan materi yang diberikan dari masyarakat untuk pemerintah desa pada saat tahapan pelaksanaan pembangunan, sumbangan tenaga adalah sumbangan atau keikutsertaan masyarakat tempatan dalam proses pembangunan desa dan memanfaatkan pembangunan yang sudah terlaksana bagaimana masyarakat memanfaatkannya dan menjaganya.

Pandangan lain tentang bentuk-bentuk partisipasi warga tersebut disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2012:32) yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dibagi menjadi empat bentuk partisipasi, yang terdiri dari:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*).
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*).
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Eko bahwa partisipasi merupakan jembatan penghubung antara Negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan. (dalam Solekhan, 2012:9). Secara substantif, partisipasi menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Suara (Voice), yang artinya bahwa setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses pemerintahan, sebaliknya pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.

- b. Akses, yaitu bahwa setiap warga masyarakat itu mempunyai kesempatan untuk mengakses atau memengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan public dan akses pada arus informasi.
- c. Kontrol, yaitu bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Geddesian (dalam Irma Purnamasari, 2008:43) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:

- a. Pendidikan melalui pelatihan.
- b. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi.
- c. Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Menurut Juliantara (dalam Irma Purnamasari, 2008:45) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

1. Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

3. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya pembangunan desa sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, maka perlu dilibatkan seluruh element masyarakat untuk ikut turun tangan dalam pembangunan infrastruktur desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan pembangunan di desa yang sedang berlangsung.

Dengan adanya keterlibatan seluruh masyarakat desa, maka seluruh pembangunan yang ada di desa dapat dirasakan seluruh masyarakat desa, tidak hanya kelompok tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena tidak menggap pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di desa itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting karena masyarakat sendirilah yang mengerti akan keadaan di daerahnya.

Maka sudah sewajarnya jika masyarakatlah yang dianggap mampu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk

pembangunan di desa. Atau partisipasi juga harus ada ketika pemerintah desa membutuhkan sebagian dari hak milik mereka yang ditukar dengan nilai yang sepadan.

Partisipasi ini muncul bisa dari kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat desa, ataupun tokoh masyarakat desa, adanya dorongan dari merekalah maka pemerintah desa semakin tergerak untuk membangun segala kebutuhan desa sesuai dengan kebutuhan fungsi dan manfaatnya yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka bisa dipastikan pembangunan desa tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak akan tepat sasaran.

Suatu pembangunan itu dikatakan berhasil tentu kita lihat kemanfaatannya untuk banyak orang, menempatkan masyarakat sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah desa dan pihak ketiga. Disini terlihat jelas bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana pembangunan dan pengontrol berbagai pembangunan baik program yang datang dari pemerintah baik program-program yang datang dari masyarakat itu sendiri.

Salah satunya diantaranya adalah pembangunan di desa kuala sempang yaitu pembangunan berkelanjutan pipanisasi yang sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuala sempang, dari pemerintah untuk desa. Dalam bab ini akan disajikan data dan informasi yang diperoleh di lapangan yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang partisipasi masyarakat di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

Keputusan Musrenbang Desa Kuala Sempang Tahun 2013, memutuskan membangun pipanisasi sepanjang tiga kilometer. Selanjutnya pembangunan pipanisasi ini dijadikan tolak ukur dalam membahas partisipasi masyarakat Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala



Lobam Kabupaten secara kualitatif ditelusuri melalui indikator-indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Rusidi (dalam Solekhan, 2012:32), terdiri atas partisipasi pemikiran, partisipasi materi, partisipasi tenaga, dan partisipasi pemanfaatan pembangunan.

## **A. Partisipasi pemikiran**

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam bentuk Pemikiran**

Masyarakat ikut terlibat dalam pengerjaan pembangunan pipanisasi di desa kuala sempang karena kesadaran akan pentingnya mereka ikut serta sebagai masyarakat tempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pipanisasi, karena jika mereka sebagai masyarakat tidak bergerak dengan ikut serta dalam pembangunan desa maka mereka sendiri yang akan merasakan dampak kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan di desa adalah mutlak seharusnya terjadi untuk mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Musrenbang Desa Tahun 2011 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2011, jam 09.00 WIB. Di Sekretariat bersama Desa Kuala Sempang. Yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat Desa Kuala Sempang, dari hasil Musrenbang ada 70 gagasan yang diberikan oleh masyarakat Desa Kuala Sempang yang kemudian di pilih melihat prioritas kebutuhan masyarakat menjadi 16 gagasan dari hasil musyawarah tersebut.

Dengan adanya semangat gotong royong bersama pemerintah desa mereka sadar betul tentang pembangunan pipanisasi akan memiliki dampak yang baik bagi daerah yang membutuhkan air bersih dan membutuhkan air sebagai sumber kehidupan, partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud nyata kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang bahwa :

“Pemikiran ini muncul ketika masyarakat Desa Kuala Sempang membutuhkan air bersih khususnya di tiga dusun yakni Tanjung arang, Simpang Centre dan Simpang Jembatan,akhirnya pada saat sebelum musrenbang tahunan 2011 RT dan RW di tiga dusun ini bermusyawarah bersama masyarakat untuk mengusulkan ide pipanisasi ini di tiga dusun yang kesulitan air bersih disaat musim panas namun memang baru terlaksana pada tahun 2013.”(*Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang Bapak Muhammad Latif , wawancara 15 juni 2015*)

Selanjutnya dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat Shalahuddin Syah bahwa :

“Memang benar di tiga dusun ini kesulitan air bersih pada saat musim panas, jadi masyarakat mengajukan usulan pembangunan pipanisai ini agar masyarakat tidak kesulitan air dan akhirnya pada saat musrenbang tahun 2013 di setujuilah pembangunan pipanisasi tersebut agar pembangunannya nanti dapat membantu dari kesulitan air.”(*Tokoh Masyarakat Shalahuddin Syah,wawancara: 15 juni 2015*)

Dari penuturan Tokoh Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat memiliki tanggungjawab memikirkan tentang kebutuhan bersama seluruh masyarakat Desa Kuala Sempang yang selanjutnya disampaikan kepada aparat desa baik melalui BPD ataupun langsung kepada pimpinan mereka yakni Kepala Desa untuk memperjuangkan ditingkat kecamatan dan kabupaten. Segala keinginan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut tentu bukan juga pemikiran dan keinginan mereka sendiri melainkan melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Kuala Sempang, bahwa:

“Dengan adanya ide pembangunan pipanisasi ini masyarakat sangat antusias mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya, karena memang awalnya masyarakat dikumpulkan untuk membicarakan ide pembangunan pipanisasi ini lalu disampaikan kepada ketua BPD dan sama-sama disampaikan kepada Kepala Desa pada saat musyawarah”(*Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara: 14 juni 2015*)

Penjelasan Ketua BPD mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka harus dimusyawahkan terlebih dahulu dilihat manfaat dari adanya suatu pembangunan dilihat apakah memang perlu pembangunan itu dilaksanakan, ketika memang itu kebutuhan orang banyak dalam

pelaksanaannya akan menjadi mudah karna dukungan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama.

Sebagian masyarakat juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik pipanisasi tersebut. Antara lain adalah partisipasi ide dengan mengusulkan agar pemanfaatan pipanisasi tidak hanya satu dusun saja namun di dusun-dusun yang masih memiliki kesulitan untuk menjangkau air bersih juga harus ada sistem pipanisasi ini agar masyarakat lain juga merasakan manfaat yang besar dengan adanya pipanisasi air masukan hal itu di terima oleh Kepala Desa dan selanjutnya dilanjutlah pembangunan pipanisasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Sempang, bahwa:

“Pada saat pemberian gagasan pemasangan jalur pipanisasi tahun 2011 diterima oleh desa namun pada saat musrebang kecamatan belum bisa dilaksanakan namun setelah penantian beberapa tahun, baru pada tahun 2013 akhirnya perjuangan masyarakat untuk membangun jalur pipanisasi air baru bisa terlaksanakan karena diterima pada saat musrenbang desa dan kecamatan.” (*Kades Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara 14 juni 2015*)

Tentunya keberhasilan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, tahapan ide-ide masyarakat dalam pembangunan desa tentu dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa demi perkembangan kemajuan desa. Dari hasil penelitian terlihat bagaimana antusiasme masyarakat memberikan ide-ide bagi pemerintah namun memang tidak bisa dilaksanakan keseluruhan karena pembangunan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan prioritas bagi seluruh masyarakat.

## **B. Partisipasi Materi (Dana atau barang)**

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Dana**

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran yang diberikan oleh masyarakat, kesiapan masyarakat untuk berswadaya artinya disini masyarakat di Desa Kuala Sempang setuju dengan adanya sumbangan suka rela dengan jenis partisipasi materi melalui bentuk dana ataupun barang

ketika memang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proyek pembangunan pipanisasi memiliki dana cukup besar namun belum mencukupi untuk menutupi atau melengkapi pembelanjaan alat-alat kelengkapan.

Tentu untuk pengadaan pipanisasi sepanjang tiga kilometer dan dipasang kerumah-rumah dana yang diperlukan harus lebih dari yang dianggarkan, dari dana awalnya hanya bisa digunakan untuk pipa induk saja belum bisa untuk mencapai dari rumah-kerumah. Dengan mencoba untuk terus berjuang agar pembangunan ini selesai pemerintah desa mengajak untuk masyarakat memberikan sumbangan suka rela agar bisa menutupi kekurangan dana pembangunan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Sempang:

“Dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah desa maka dengan inisiatif masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan secara sukarela agar pembangunan yang sedang berlangsung terus berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Kuala Sempang. Pada pertemuan Desa.”(*Kepala Desa Kuala Sempang Bapak Selamat, wawancara:14 juni 2015*)

Himbauan tersebut ternyata disambut baik oleh warga dan tokoh masyarakat, sambutan baik itu dimaksudkan adalah masyarakat memberikan sumbangan dana sukarela pada saat tahapan pelaksanaan untuk digunakan oleh tim pelaksana pembangunan desa agar menggunakan untuk membeli kelengkapan sesuai kebutuhannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang bahwa:

“Mengenai partisipasi dalam bentuk uang memang diberikan masyarakat dalam pembangunan pipanisasi ini namun tidak semua dimintai sumbangan yang dianggap lebih tingkat ekonominya maka dimintai dana sumbangan sukarela.”(*Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang Bapak Muhammad Latif, wawancara 15 juni 2015*)

Selanjutnya yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kuala Sempang bahwa:

“Biaya yang masyarakat berikan pada saat pembangunan pipanisasi ini memang merupakan untuk kebutuhan bersama, sudah sewajarnya masyarakat membantu sesuai kemampuan masing-masing untuk terlaksananya pembangunan pipanisasi ini.”(*Masyarakat Desa Kuala Sempang Bapak Ramli, wawancara 16 juni 2015*)

Berdasarkan penjelasan dari informan bahwa memang benar ada partisipasi masyarakat dalam bentuk dana dalam pelaksanaan pembangunan pipanisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dana yang diberikan oleh masyarakat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya yang dimiliki oleh pemerintah desa pada saat pelaksanaan pembangunan pipanisasi tersebut dan itu merupakan sumbangan sukarela yang telah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh kepala desa dan masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan yang sedang berlangsung. Dan masyarakatpun tidak menolak untuk memberikan sumbangan tersebut karena sumbangan tersebut jelas untuk menyelesaikan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat tempatan.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Barang**

Indikator dalam partisipasi Materi terbagi dua yakni yang pertama adalah sebagaimana yang telah dibahas di atas yakni tentang partisipasi dana dan selanjutnya membahas tentang partisipasi barang pada saat pelaksanaan pembangunan di Desa Kuala Sempang. Khususnya dalam pembangunan pipanisasi berdasarkan penelitian yang ditemukan di lapangan memang tidak seperti partisipasi dalam bentuk dana dimana seluruh masyarakat yang mampu untuk partisipasi dalam bentuk dana masyarakat sepenuhnya akan berpartisipasi dalam bentuk dana.

Berbeda dengan partisipasi dalam bentuk barang sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Kuala Sempang bahwa:

“Di dalam pelaksanaan pembangunan pipanisasi di Desa Kuala Sempang memang tidak ada masyarakat yang memberikan sumbangan dalam bentuk barang yang diberikan oleh masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk dana yang diberikan untuk pembangunan pipanisasi.”(*Kades Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara: 14 juni 2015*)

Selanjutnya yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Kuala Sempang bahwa:

“Untuk partisipasi jenis barang memang belum ada sampai dengan saat ini yang ada hanya pemberian sumbangan dana secara sukarela dari masyarakat agar pembangunan pipanisasi

cepat selsesai.”(*Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang Bapak Muhammad Latif , wawancara 15 juni 2015*)

Masyarakat memang dalam hal partisipasi dalam bentuk barang tidak memberikan barang dikarenakan pada saat penyapaian infomasi dalam pembangunan adalah dana yang telah diberikan kepada pemerintah deasa memang akan digunakan untuk pembelanjaan perlengkapan kekurangan barang dalam pembangunan pipanisasi tersebut.

Selanjutnya yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Kuala Sempang Mengenai partisipasi barang yakni:

“Selama ini memang dalam pelaksanaannya kami selaku BPD juga tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk barang yang kami berikan adalah dalam bentuk dana sama dengan yang diberikan oleh masyarakat.”(*Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015*)

Dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan memang pada kenyataan dilapangan tidak ditemukan partisipasi masyarakat dalam bentuk barang melainkan partisipasi masyarakat yang diberikan oleh masyarakat di Desa Kuala Sempang adalah partisipasi dalam bentuk dana yang diberikan sukarela lantas digunakan untuk kebutuhan pembangunan pipanisasi yang sedang berlangsung.

## **C. Partisipasi Tenaga**

### **1. Partisipasi Masyarakat Pada Saat Pelaksanaan Pembangunan**

Selain partisipasi dalam bentuk ide dan materi, tenaga juga merupakan salah satu partisipasi yang sangat potensial dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kuala Sempang, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan proyek pipanisasi. Keterbatasan dana di Desa Kuala Sempang memang tidak mengurangi semangat gotongroyong masyarakat untuk terus membangun di desa kuala sempang mereka masih bisa terus mengerjakan suatu pembangunan hingga selesai misalnya dalam tower air, gedung TPA dan lain sebagainya.

Kenyataan dilapangan memang ditemukan seperti ini semangat membangun untuk kepentingan masyarakat didalam diri masyarakat jelas tercermin didalamnya. Masyarakat juga diarahkan untuk terus ikut andil didalam pembangunan di Desa Kuala Sempang tidak semata-mata tergantung aspek anggaran. Tetapi faktor kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kuala Sempang, artinya didalam skripsi ini adalah bagaimana pemerintah desa disini Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur dan transparan.

Dengan demikian masyarakat akan merasa terdorong untuk mengikuti arahan dari pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat di Desa Kuala Sempang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan, Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Sempang adalah:

“Di Desa Kuala Sempang gotong royong dilaksanakan dalam sebulan sekali melihat kondisi alam maksudnya adalah melihat cuaca saat melaksanakan pembersihan jalan, masjid, dan kantor desa. Serta kegiatan yang membutuhkan masyarakat secara langsung seperti pembangunan tower air di sei lepan masyarakat sadar akan manfaat yang akan dirasakan maka masyarakat pun semangat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut dengan ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunannya.” (*Kades Kuala Sempang Bapak Selamat, wawancara:14 juni 2015*).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Selamat selaku Kepala Desa Kuala Sempang banyak anggota masyarakat yang menyertakan diri pada saat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pipanisasi di Desa Kuala Sempang ini karena memang masyarakat sadar betul akan pentingnya sumber air yang akan mereka dapatkan dengan adanya fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa meskipun didalam penyelenggaraanya terdapat anggaran untuk pembangunan tersebut namun para anggota masyarakat tidak memikirkan nilai upah yang akan diberikan namun mereka menilai manfaat yang akan mereka rasakan ketika pembangunan

pipanisasi ini telah berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Kuala Sempang:

“Selain penyertaan dari masyarakat Desa Kuala Sempang, khususnya BPD juga membantu tenaga ikut dalam pelaksanaan pipanisasi ini walaupun tidak semuanya ikut serta,”(**Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015**).

Selanjutnya yang disampaikan oleh Kades Kuala Sempang adalah:

“Banyak anggota masyarakat yang terlibat tanpa melihat berapa upah yang mereka dapatkan, karena mereka menganggap bahwa pentingnya pembangunan pipanisasi ini untuk kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga menunjuk tim sebagai pengelola teknis pipanisasi tersebut.”(**Kades Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara 14 juni 2015**).

Penjelasan dari Kepala Desa menunjukkan bahwa partisipasi di Desa Kuala Sempang memang harus diakui dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah ikut berpartisipasi didalam pembangunan desa kuala sempang sebagaimana cita-cita pemerintah desa adalah mensejahterakan masyarakat di desa ini salah satunya caranya menempatkan masyarakat didalam perencanaan dan pengerjaan pembangunan desa karena semua manfaatnya adalah untuk masyarakat dari masyarakat yang memberikan ide dan pelaksanaan oleh masyarakat dan dampak dan manfaatnya juga akan diraksanan seluruh masyarakat. Walaupun harus menerima kenyataan pada saat pelaksanaan ada anggota masyarakat yang harus kerja di luar desa untuk mencari nafkah untuk mencari nafkah keluarga mereka sehari-hari.

Penyertaan masyarakat didalam pembangunan desa tidak ada sama sekali unsur paksaan namun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa itu memang muncul dari diri masyarakat yang mereka berikan adalah parisipasi tenaga pada saat pelaksanaan pembangunan pipanisasi adalah suatu upaya untuk mewujudkan dan percepatan penyelesaian pembangunan pipanisi yang ada di Desa Kuala Sempang agar dapat dirasakan oleh seluruh warga yang membutuhkan sumber aini sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh Masyarkat :



“Masyarakat memang sangat antusias sekali dengan adanya pembangunan pipanisasi ini oleh karenanya banyak sekali masyarakat tegerak hatinya untuk ikut bekerja menyelesaikan proyek ini”(Tokoh Masyarakat Shalahuddin Syah,wawancara: 15 juni 2015)

Pada hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat antusias dalam partisipasi tenaga pada saat pelaksanaan pembangunan karena masyarakat sadar bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata akan kembali dan dirasakan oleh masyarakat sendiri.

#### **D. Partisipasi Pemanfaatan**

##### **1. Partisipasi Pemanfaatan Pembangunan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan didalam pembahasan dalam skripsi ini adanya berbagai indikator-indikator yang ada mulai dari partisipasi ide yang diberikan oleh masyarakat, partisipasi materi yang disumbangkan untuk pembangunan desa, partisipasi tenaga ikut serta dalam pembangunan hingga dengan partisipasi pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan yang sudah terlaksana. Suatu pembangunan itu bermanfaat ketika memang pembanguna itu dilaksanakan untuk kebutuhan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Kuala Sempang :

“Memang masyarakat sangat terasa terbantu dengan adanya fasilitas air bersih yang disalurkan melalui pipanisasi ini yang sebelumnya sumber air jauh dari jangkauan rumah namun sekarang masyarakat dengan mudah mendapatkan air dirumah mereka karena sudah ada saluran pipa-pipa air yang tersambung dirumah masyarakat,”(Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015)

Informasi yang diberikan oleh Ketua BPD ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang ada dan bisa dimanfaatkan bersama seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang yang tadinya kesulitan dengan jauhnya air namun saat ini sudah mudah untuk menemukan air bersih tidak perlu membeli atau pergi ke kolam air karna pipa air yang dikerjakan oleh pemerintah desa dan masyarakat telah masuk kerumah-rumah

masyarakat dan sepenuhnya bisa digunakan. Selanjutnya dipaparkan oleh Tokoh Masyarakat, bahwa:

“Perjuangan masyarakat di Desa Kuala Sempang mengenai pembangunan pipanisasi ini sudah lama ingin dilaksanakan namun memang pada saat tahun 2009 tidak dimanfaatkan awalnya hanya ada mesin dan bak air nya saja belum ada pipa saluran untuk menuju kerumah-rumah warga yang membutuhkan air, dan pada tahun 2011 diajukan pada saat musrenbang oleh warga Desa Kuala Sempang yang berada didua dusun yaitu dusun Tanjung Arang dan Simpang centre, alhamdulillah akhirnya pada tahun 2014 sudah bisa drasakan manfaat dari pembagunan pipanisasi ini.”(*Tokoh Masyarakat Shalahuddin Syah, wawancara 15 juni 2015*)

Selanjutnya yang dipaparkan oleh Tokoh Masyarakat :

“Sangat terasa manfaat dari adanya pipanisi ini karna memudahkan masyarakat mendapatkan air dirumah mereka, dari yang awalnya 18 rumah yang bisa menikmati program ini lantas perlahan menjadi 33 rumah akhir tahun 2015 sudah 83 rumah yang menggunakan sistem pipanisasi air ini yang mana sisa beberapa rumah memang belum terjangkau karna memang jaraknya terlalu jauh dari hasil swadaya pun uangnya belum mencukupi untuk membeli pipa induk air jadi harus menunggu bantuan dari pemerintah daerah dahulu. Memang seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat berterima kasih kepada pemerintah desa karena sudah mau sama-sama memperjuangkan masyarakat yang membutuhkan air bersih hingga pembangunan ini benar-benar terlaksana.”(*Tokoh Masyarakat Muhammad Latif, wawancara 14 juni 2015*)

Penjelasan dari hasil wawancara menjelaskan bahwa pembangunan pipanisasi ini memang bermanfaat bagi seluruh warga di Desa Kuala Sempang yang membutuhkan tak heran jika yang awalnya masih meragukan dengan program ini namun mereka mengikuti rekan-rekan sesame masyarakat untuk memasang saluran pipa untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan tidak perlu membeli air dan jauh-jauh pergi mencari air bersih, memang seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat berterima kasih kepada pemerintah desa telah menyelesaikan pembangunan yang tepat sasaran yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan pembangunan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan masyarakat di Desa Kuala Sempang, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kuala Sempang telah berjalan dengan cukup baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan pipanisasi di desa ini.

Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yang diteliti oleh peneliti, ternyata bentuk-bentuk partisipasi sudah berjalan dilihat dari adanya sumbangan ide yang diberikan oleh masyarakat salah satunya adalah ide pembangunan pipanisasi, partisipasi materi juga terlihat dalam pembangunan pipanisasi yang diberikan oleh masyarakat, partisipasi tenaga yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan pipanisasi ini juga terlihat dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan terakhir adalah partisipasi pemanfaatan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan pipanisasi yang tepat sasaran masyarakatpun mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik pembangunan pipanisasi ini.

Dorongan dari Kepala Desa Kuala Sempang dan aparatnya cukup berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah pembangunan pipanisasi ini sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Kuala Sempang.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Masyarakat Desa Kuala Sempang dapat berkerja sama bersama Pemerintah Desa agar mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat desa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai pembangunan desa melalui media yang tersedia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arief, Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif. Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad, 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nyoman, I Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

### **Dokumen**

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005.

RPJM-Desa Tahun 2011-2015 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lombam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Skripsi**

Umar Mustari, 2011. *Skripsi Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*.

Irma Puranamasari, 2008. *Tesis Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*.

Andi Ripai, 2013. *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*.

### **Internet**

Rizuan Ramadhan, 2012. *Pengertian Partisipasi*. Dalam <http://rizuanramadhan.blogspot.com/2013/12/pengertian-partisipasi.html>

Saca Firmansyah, 2009. *Partisipasi Masyarakat*. Dalam <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>

Aditama, 2008. *Pendidikan dan Pembangunan*. Dalam [www.bit.lipi.go.id](http://www.bit.lipi.go.id).2008

Wordpress,

2014.*Pentingnya*

*Partisipasi.*

Dalam

<https://ppmdeliserdang.wordpress.com/perihal/>